

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources merupakan suatu gambaran bahwa fenomena eksploitasi masih terjadi di Abad 21 ini. Meskipun telah terdapat banyak instrumen hukum internasional yang menjamin hak individu dan buruh, namun faktor permintaan pasar masih memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan suatu perusahaan. Hal ini adalah yang terjadi di PBR, yaitu ketika para ABK asing dieksploitasi demi memenuhi kepentingan perusahaan. Adapun bentuk eksploitasi terhadap ABK asing yang terjadi di PBR adalah para ABK dipekerjakan selama 12-24 jam dalam sehari, minimnya upah yang diberikan, adanya penyiksaan fisik apabila para ABK tidak patuh terhadap nakhkodanya, hingga adanya pembunuhan yang dibuktikan oleh ditemukannya kuburan massal di sekitar wilayah perusahaan.

Dengan menggunakan teori *Primitive Accumulation* dari Marxisme dan teori Global Value Chain (GVC), penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendasari munculnya tindak eksploitasi di PBR. Pertama, karena faktor permintaan global. GVC membantu menjelaskan bahwa terdapat tiga pola interaksi ekonomi global dalam rantai produksi perikanan internasional dalam penelitian ini, yaitu PBR sebagai pihak *supplier*, Thai Union dan Kingfisher di Thailand sebagai *lead firm*, serta permintaan pasar

global yakni masyarakat di Amerika Serikat sebagai pihak konsumen. Berdasarkan data FAO di tahun 2015, permintaan pasar di AS adalah terbesar nomor satu di dunia.

Teori GVC membantu mengemukakan bahwa di dalam kasus PBR, terdapat satu tipe *governance*, yaitu *captive*. Dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam tipe *captive*, peneliti menemukan bahwa dalam lingkup global, penyebab PBR mengeksploitasi ABK asingnya adalah karena teknologi pengolahan produk perikanan hanya ada di Thai Union dan Kingfisher, bukan di PBR. Penyebab selanjutnya adalah karena produk perikanan dari PBR tidak terkodifikasi sebagaimana Thai Union dan Kingfisher yang dapat mengekspor produk perikananannya dengan label nama perusahaan mereka. Yang terakhir adalah lemahnya kapabilitas *supplier* atau dalam hal ini adalah PBR. Posisi PBR dikatakan lemah karena tidak memiliki posisi yang kuat untuk melawan tatanan yang ada, atau dalam hal ini adalah Thai Union dan Kingfisher.

Dalam kaitannya dengan permintaan global atau dalam hal ini adalah AS, terdapat *clash* antara permintaan pasar dengan regulasi impor di AS. Di dalam The Tariff Act 1930 telah diatur standar bahwa AS melarang impor berbagai produk yang dihasilkan dari tindak eksploitasi. Meskipun demikian, di dalam The Tariff Act 1930 terdapat klausa "*consumptive demand*", yang selanjutnya membatasi ruang gerak U.S Customs and Border Protection (CBP) untuk menjamin *shipment* barang ke AS terbebas dari tindak eksploitasi. Klausa "*consumptive demand*" ini diartikan bahwa jika pasokan belum memadai untuk memenuhi permintaan domestik, maka impor diizinkan terlepas dari bagaimana produk tersebut dihasilkan (CBP, 2016).

Klausa “*consumptive demand*” ini berlaku pula untuk produk perikanan di AS, mengingat dalam kurun waktu 2011 hingga 2015, angka impor produk perikanan AS selalu lebih besar daripada eksportnya AS ke negara lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan AS selalu mengalami defisit, sehingga membutuhkan impor produk perikanan dalam jumlah besar. Untuk memenuhi hal tersebut, maka PBR, Thai Union dan Kingfisher terlibat dalam rantai global produk perikanan untuk masyarakat AS.

Faktor penyebab kedua yang menyebabkan PBR mengeksploitasi ABK asingnya adalah karena PBR yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, PBR sebagai salah satu perusahaan perikanan besar di wilayah Maluku, memiliki pendapatan yang sangat besar setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp.131 Miliar di tahun 2013, Rp.145 Miliar di tahun 2014, dan Rp.37 Miliar terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2015. Kondisi ini tidak sebanding dengan upah yang diberikan untuk para ABK asing yang hanya mendapatkan Rp.600.000,00 per bulan, ataupun Rp.1.500.000,00 untuk jangka waktu dua bulan bekerja. Besaran upah tersebut tentu tidak sebanding dengan kerja keras dan bahkan dapat bertaruh nyawa yang mereka laksanakan setiap harinya. *Primitive accumulation* di dalam Marxisme membantu menjelaskan bahwa salah satu cara agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, adalah dengan cara eksploitasi. Hal ini adalah yang terjadi di PBR, yaitu ketika para ABK diperlakukan sebagai “mesin hidup” yang bertujuan semata-mata untuk memperkaya pihak perusahaan, bukan untuk mereka.

Faktor penyebab yang ketiga adalah lemahnya kontrol pihak negara-negara yang terlibat dalam rantai perdagangan produk perikanan dari PBR. Dari pihak Indonesia, kelemahan terletak pada pengawasan di wilayah Benjina. Data yang didapat dari KKP menyebutkan bahwa aparat yang bertugas mengawasi aktivitas di sekitar PBR hanya terdiri dari dua orang personel pengawas perikanan dan dua orang personel Pos TNI AL. Kondisi diperparah dengan letak geografis PBR dengan Polsek Dobo yang berjarak 35 km dan terpisah oleh lautan. Hal ini adalah yang kemudian menyebabkan pihak PBR semakin leluasa untuk mengeksploitasi para ABKnya. Dari pihak Thailand, kontrol yang lemah terletak pada regulasi untuk memberantas tindak perdagangan manusia, serta banyaknya broker yang menjadi penyambung antara PBR dengan ABK asal Myanmar, Thailand, Laos dan Kamboja. Sementara itu, dari pihak AS kontrol yang lemah terletak pada keterbatasan kapasitas CBP untuk menangani *shipment* yang diduga melibatkan tindak eksploitasi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab suatu perusahaan dapat melakukan tindak eksploitasi bukan hanya disebabkan oleh kepentingan pihak perusahaan semata-mata. Tetapi juga dapat disebabkan oleh interaksi global, yaitu mengenai bagaimana investasi yang dari pihak negara lain dapat membentuk pola kejahatan, serta permintaan yang besar dari negara maju dapat mendukung langgengnya pola kejahatan tersebut.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis terhadap Pemerintah Indonesia terkhusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

adalah dengan mengawal tiga regulasi yang telah dibuat untuk menjamin HAM para ABK yang bekerja di wilayah Indonesia. Untuk dapat mengawal regulasi tersebut, penulis menyarankan agar pihak KKP bekerja sama dengan jajaran TNI AL untuk melakukan pengawasan secara teratur dalam hal memeriksa kondisi kapal perikanan untuk memastikan bahwa setidaknya standar kondisi kerja minimum diterapkan, dan mengidentifikasi apabila ada indikasi tindak eksploitasi. Selain itu, penulis menyarankan pula agar ditambahkan jumlah personel pengawas perikanan dan TNI AL, baik yang bertugas di Pos TNI AL ataupun yang bertugas untuk melakukan inspeksi ke perusahaan perikanan.

Saran kedua ditujukan untuk pihak Pemerintah AS dan pihak retail, yaitu agar lebih selektif dalam kegiatan impor produk perikanan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan meningkatkan *multitraceability* atau kemampuan untuk mendeteksi asal produk perikanan tersebut. Hal ini digunakan agar terciptanya keamanan pangan yang terhindar dari tindak eksploitasi ABK. Koordinasi juga perlu ditingkatkan dengan U.S Customs and Border Protection (CBP) untuk menyita kapal impor yang dicurigai membawa muatan produk perikanan yang diduga berasal dari tindak eksploitasi. Hal ini guna mengembalikan fungsi CBP pasca penghapusan klausa “*consumptive demand*”, yaitu untuk mengidentifikasi, mengusut ke ranah hukum dan bahkan menolak kapal impor yang mencurigakan untuk masuk wilayah AS.

Penelitian ini telah mampu menganalisis faktor penyebab tindak eksploitasi di suatu perusahaan internasional. Namun, untuk penelitian berikutnya peneliti menyarankan agar lebih baik lagi dalam memandang faktor penyebab dari sisi negara asal para ABK asing

PBR, yaitu Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk memperluas area penelitian. Tindak kejahatan serupa bukan hanya terjadi di sektor perikanan Indonesia saja, namun terdapat pula di negara lain, seperti New Zealand dan Taiwan. Bahkan, yang menjadi korban dari eksploitasi di kedua negara tersebut adalah para ABK asal Indonesia.